

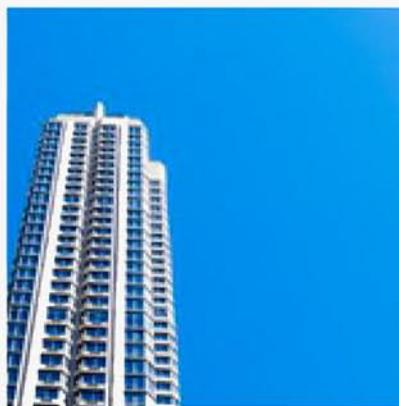
LAPORAN KEUANGAN 2021

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DPUPR



- LRA
- Laporan Operasional
- Neraca
- LPE
- CaLK



KATA PENGANTAR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akreal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2021

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prov Kalbar

SUKRI, ST., MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.
 - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2. Laporan Operasional
 - 3.1.3. Neraca
 - 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2021

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prov Kalbar

SUKRI, ST., MT

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 679.449.261.530,00 atau mencapai 88,64% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 766.540.227.246,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 0,00, beban sebesar 372.689.383.977,25 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -372.689.383.977,25.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.207.886.472.101,38 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 94.268.597.759,75 Aset Tetap sebesar Rp. 3.622.897.695.516,63 Aset Lainnya sebesar Rp. 490.720.178.825,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 892.258.540,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 4.206.994.213.561,38, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 4.207.886.472.101,38

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -372.689.383.977,25 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 3.818.088.594.416,63 sehingga Ekuitas Akhir entitas DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.543.023.547.433,38.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	766.540.227.246,00	679.449.261.530,00	88,64	0,00
BELANJA OPERASI	253.291.506.903,00	232.911.262.758,00	91,95	0,00
Belanja Pegawai	7.440.587.322,00	6.850.462.064,00	92,07	0,00
Belanja Barang	222.525.828.322,00	212.189.067.694,00	95,35	0,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	23.325.091.259,00	13.871.733.000,00	59,47	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	253.291.506.903,00	232.911.262.758,00	91,95	0,00
BELANJA MODAL	513.248.720.343,00	446.537.998.772,00	87,00	0,00
Belanja Tanah	480.519.245,00	324.334.992,00	67,50	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	916.324.435,00	861.374.200,00	94,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	228.925.585.847,00	196.441.235.488,00	85,81	0,00
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	282.176.290.816,00	248.861.576.092,00	88,19	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	750.000.000,00	49.478.000,00	6,60	0,00
Jumlah Belanja Modal	513.248.720.343,00	446.537.998.772,00	87,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	766.540.227.246,00	679.449.261.530,00	88,64	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(766.540.227.246,00)	(679.449.261.530,00)	(88,64)	0,00
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(766.540.227.246,00)	(679.449.261.530,00)	(88,64)	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021
 PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov
 Kalbar

SUKRI, ST., MT
 NIP: 19690301 199203 1 009

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	6.842.092.064,00	0,00	6.842.092.064,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	139.224.210.230,25	0,00	139.224.210.230,25	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	13.871.733.000,00	0,00	13.871.733.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi	159.938.035.294,25	0,00	159.938.035.294,25	0,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.334.582.982,00	0,00	2.334.582.982,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.925.699.493,00	0,00	7.925.699.493,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.052.374.058,00	0,00	183.052.374.058,00	0,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	19.390.499.650,00	0,00	19.390.499.650,00	0,00
Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	48.192.500,00	0,00	48.192.500,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	212.751.348.683,00	0,00	212.751.348.683,00	0,00
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	372.689.383.977,25	0,00	372.689.383.977,25	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(372.689.383.977,25)	0,00	(372.689.383.977,25)	0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(372.689.383.977,25)	0,00	(372.689.383.977,25)	0,00
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(372.689.383.977,25)	0,00	(372.689.383.977,25)	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov
Kalbar

SUKRI, ST., MT
NIP: 19690301 199203 1 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	ASET	4.207.886.472.101,38	0,00
2	ASET LANCAR	94.268.597.759,75	0,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Jumlah Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
13			
14	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
15	Investasi dalam Saham	0,00	0,00
16	Investasi dalam Deposito	0,00	0,00
17	Investasi dalam SUN	0,00	0,00
18	Investasi dalam SBI	0,00	0,00
19	Investasi dalam SPN	0,00	0,00
20	Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
21	Jumlah Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
22			
23	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
24	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00
25	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
26	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)	0,00	0,00
27	Piutang Pajak Air Permukaan	0,00	0,00
28	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
29	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00
30	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00
31	Piutang Pajak Hiburan	0,00	0,00
32	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00
33	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
34	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00
35	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00
36	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
37	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00
38	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan (PBBP2)	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
39	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00
40	Jumlah Piutang Pendapatan	0,00	0,00
41			
42	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
43	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
44	Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
45	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
46	Jumlah Piutang Retribusi	0,00	0,00
47			
48	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
49	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00
50	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00
51	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta	0,00	0,00
52	Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
53			
54	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
55	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
56	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
57	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
58	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00
59	Piutang Jasa Giro	0,00	0,00
60	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
61	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	0,00
62	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00
63	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00
64	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing	0,00	0,00
65	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
66	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00
67	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00
68	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00
69	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
70	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00
71	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
72	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00
73	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
74	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00
75	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00
76	Pendapatan Zakat	0,00	0,00
77			
78	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
79	Piutang Dana Perimbangan	0,00	0,00
80	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
81	Piutang Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
82	Piutang Dana Keistimewaan	0,00	0,00
83	Piutang Dana Desa	0,00	0,00
84	Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
85			
86	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
87	Piutang Bagi Hasil	0,00	0,00
88	Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00
89	Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
90			
91	Piutang Lainnya	0,00	0,00
92	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
93	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
94	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
95	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
96	Uang Muka	0,00	0,00
97	Jumlah Piutang lainnya	0,00	0,00
99			
100	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
101	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
103	Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00
104			
105	Beban Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
106	Beban Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
107	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
108			
109	Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
110	Barang Pakai Habis	94.264.126.294,00	0,00
111	Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
112	Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
113	Jumlah Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
114			
115	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
116	RK SKPD	0,00	0,00
117	Jumlah Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
119			
120	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
122	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
123	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
124	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
125	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
126	Dana Bergulir	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
127	Penyertaan Modal	0,00	0,00
128	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
129	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
130			
131	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
132	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
133	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
135			
136	ASET TETAP	3.622.897.695.516,63	0,00
137	Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
138	Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
139	Jumlah Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
140			
141	Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	0,00
142	Alat Besar	26.102.044.387,00	0,00
143	Alat Angkutan	8.539.479.798,00	0,00
144	Alat Bengkel dan Alat Ukur	490.259.510,00	0,00
145	Alat Pertanian	0,00	0,00
146	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.360.748.668,00	0,00
147	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	327.960.662,00	0,00
148	Alat Kedokteran dan Kesehatan	111.772.774,00	0,00
149	Alat Laboratorium	3.669.727.717,00	0,00
150	Alat Persenjataan	32.181.052,00	0,00
151	Komputer	4.720.159.338,00	0,00
152	Alat Eksplorasi	25.000.000,00	0,00
153	Alat Pengeboran	0,00	0,00
154	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00
155	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
156	Alat Keselamatan Kerja	6.517.740,00	0,00
157	Alat Peraga	0,00	0,00
158	Peralatan Proses/Produksi	3.261.379,00	0,00
159	Rambu-rambu	29.525.064,00	0,00
160	Peralatan Olahraga	0,00	0,00
161	Jumlah Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	0,00
162			
163	Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	0,00
164	Bangunan Gedung	182.039.168.526,00	0,00
165	Monumen	2.657.200.000,00	0,00
166	Bangunan Menara	0,00	0,00
167	Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.416.574.979,00	0,00
168	Jumlah Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	0,00
169			
170	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.230.898.204.928,63	0,00
171	Jalan dan Jembatan	2.786.776.692.766,63	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
172	Bangunan Air	430.808.908.637,00	0,00
173	Instalasi	11.691.067.000,00	0,00
174	Jaringan	1.621.536.525,00	0,00
175	Jumlah Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.230.898.204.928,63	0,00
176			
177	Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	0,00
178	Bahan Perpustakaan	36.381.510.320,00	0,00
179	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00
180	Hewan	0,00	0,00
181	Biota Perairan	0,00	0,00
182	Tanaman	0,00	0,00
183	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
184	Aset Tetap Dalam Renovasi	19.390.499.650,00	0,00
185	Jumlah Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	0,00
186			
187	Konstruksi Dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	0,00
188	Konstruksi Dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	0,00
189	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	0,00
190			
191	Akumulasi Penyusutan	(1.842.696.350.924,00)	0,00
192	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(43.223.811.862,00)	0,00
193	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.134.125.463,00)	0,00
194	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.743.947.913.949,00)	0,00
195	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.390.499.650,00)	0,00
196	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.842.696.350.924,00)	0,00
198			
199	Dana Cadangan	0,00	0,00
200	Dana Cadangan	0,00	0,00
201	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
202			
203	Aset Lainnya	490.720.178.825,00	0,00
204	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
205	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
206	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
207	Jumlah Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
208			
209	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
210	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
211	Sewa	0,00	0,00
212	Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
213	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
214	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
215	Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
216			

NO	URAIAN	2021	2020
217	Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
218	Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
219	Jumlah Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
220			
221	Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
222	Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
223	Jumlah Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
224			
225	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.018.577.295,00)	0,00
226	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.018.577.295,00)	0,00
227	Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.018.577.295,00)	0,00
228			
229	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
230	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
231	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
234			
235	KEWAJIBAN	892.258.540,00	0,00
236	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
237	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
238	Utang Taspen	0,00	0,00
239	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
240	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
241	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
242	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
243	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
244	Utang Taperum	0,00	0,00
245	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
246	Utang PPH 4 Ayat 2	0,00	0,00
247	Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
249			
250	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
251	Utang Bunga	0,00	0,00
252	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
253	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
254	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
255	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
256	Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
257	Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
258	Jumlah Utang Bunga	0,00	0,00
259			
260	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
261	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
262	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
263	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
264	Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
265	Jumlah Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
266			
267	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
268	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
269	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
270	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
271	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
272	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
273	Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
274			
275	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
276	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
277	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
278	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
279	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
280			
281	Utang Belanja	892.258.540,00	0,00
282	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
283	Utang Belanja Barang dan Jasa	892.258.540,00	0,00
284	Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
285	Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
286	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
287	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
288	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
289	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
290	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
291	Utang Belanja Modal Aset Tak Berwujud-Software	0,00	0,00
292	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
293	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
294	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
295	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
296	Jumlah Utang Belanja	892.258.540,00	0,00
297			
298	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
299	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
300	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
301	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
302	Utang Transfer	0,00	0,00
303	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
304			
305	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
306	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
307	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
308	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
309	Jumlah Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
310			
311	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
312	Utang kepada LKB-BUMN	0,00	0,00
313	Utang kepada LKB-BUMD	0,00	0,00
314	Utang kepada LKB-Swasta	0,00	0,00
315	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
316			
317	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	0,00	0,00
318	Utang kepada LKBB-BUMN	0,00	0,00
319	Utang kepada LKBB-BUMD	0,00	0,00
320	Utang kepada LKBB-Swasta	0,00	0,00
321	Jumlah Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	0,00	0,00
322			
323	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
324	Obligasi	0,00	0,00
325	Jumlah Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
327	JUMLAH KEWAJIBAN	892.258.540,00	0,00
328			
329	EKUITAS	0,00	0,00
330	Ekuitas	3.915.712.931.410,63	0,00
331	Surplus/Defisit LO	(372.689.383.977,25)	0,00
332	RK PPKD	663.970.666.128,00	0,00
333	JUMLAH EKUITAS	4.206.994.213.561,38	0,00
334	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.207.886.472.101,38	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021
 PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov
 Kalbar

SUKRI, ST., MT
 Pembina Tingkat 1/ IVb
 19690301 199203 1 009

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	ASET	4.207.886.472.101,38	0,00
2	ASET LANCAR	94.268.597.759,75	0,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
23	Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
25	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
26	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
27	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
28	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
30	Dana Bergulir	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
31	Investasi Permanen	0,00	0,00
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
33	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
34			
35			
36	ASET TETAP	3.622.897.695.516,63	0,00
37	Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
38	Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	0,00
39	Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	0,00
40	Jalan, Irigasi , dan jaringan	3.230.898.204.928,63	0,00
41	Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	0,00
42	Kontruksi dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan	(1.842.696.350.924,00)	0,00
44		0,00	0,00
45	DANA CADANGAN	0,00	0,00
46	Dana Cadangan	0,00	0,00
47		0,00	0,00
48	ASET LAINNYA	0,00	0,00
49	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
52	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
53	Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
54	Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.018.577.295,00)	0,00
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
57			
58	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.207.886.472.101,38	0,00
59	KEWAJIBAN	892.258.540,00	0,00
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	892.258.540,00	0,00
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
62	Utang Bunga	0,00	0,00
63	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
65	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
66	Utang Belanja	892.258.540,00	0,00
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
69	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
71	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
72	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
73	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
74	EKUITAS	4.206.994.213.561,38	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov
Kalbar

SUKRI, ST., MT

NIP: 19690301 199203 1 009

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
PENDAPATAN			
EKUITAS AWAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(370.727.554.783,25)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		97.624.336.994,00	0,00
LAIN LAIN		3.818.088.594.416,63	0,00
EKUITAS AKHIR		3.544.985.376.627,38	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov
Kalbar

SUKRI, ST., MT

NIP: 19690301 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

- 3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.
 - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2. Laporan Operasional
 - 3.1.3. Neraca
 - 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
1.03.0.00.0.00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	766.540.227.246,00	679.449.261.530,00	(87.090.965.716,00)	88.63
	BELANJA OPERASI	253.291.506.903,00	232.911.262.758,00	(20.380.244.145,00)	91.95
	BELANJA MODAL	513.248.720.343,00	446.537.998.772,00	(66.710.721.571,00)	87.00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.030.734.194,00	9.438.493.616,00	(1.592.240.578,00)	85.56
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	104.097.445.246,00	102.030.117.725,00	(2.067.327.521,00)	98.01
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	117.343.082,00	110.885.000,00	(6.458.082,00)	94.49
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	102.035.504,00	95.559.300,00	(6.476.204,00)	93.65
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	120.046.229,00	114.866.475,00	(5.179.754,00)	95.68
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	117.323.192,00	110.696.900,00	(6.626.292,00)	94.35
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	645.430.687,00	479.748.150,00	(165.682.537,00)	74.32
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	225.415.212.253,00	192.681.087.085,00	(32.734.125.168,00)	85.47
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	29.826.469.993,00	20.980.927.150,00	(8.845.542.843,00)	70.34
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	393.516.099.383,00	351.988.268.674,00	(41.527.830.709,00)	89.44
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	475.408.373,00	360.168.894,00	(115.239.479,00)	75.75
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.076.679.110,00	1.058.442.561,00	(18.236.549,00)	98.30

2.1.

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.115.539,00	3.615.539,00	70,67	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	0,00	0,00	Anggaran Sisa Kode Rekening Lama DPUPR
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000,00	3.600.000,00	37,50	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.107.258,00	1.171.500,00	55,59	Kebutuhan akan bahan komputer telah terpenuhi, sehingga anggaran tidak direalisasikan sebagai bentuk efisiensi anggaran.
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.200,00	0,00	0,00	Anggaran Sisa Rekening DPUPR Lama
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	154.844.000,00	105.087.000,00	67,86	Tidak dapat dilakukannya perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan penilaian aset tanah dibawah jalan, dikarenakan lokasi yang akan dilakukan peniaian mengalami Banir.
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.200.000,00	4.268.000,00	59,27	1. Anggaran ditambah pada saat perubahan APBD, untuk persiapan rapat HKPU, ternyata HKPU bukanlah agenda Pemerintah Daerah dan rapat tidak jadi dilaksanakan. 2. Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan.
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000,00	1.744.000,00	48,44	Pembatasan penerimaan tamu secara tatap muka, sebagai salah satu upaya pengendalian penyebaran virus COVID 19
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.184.517.689,00	457.575.825,00	38,62	Pengadaan Sistem informasi ke-Pu-an pada saat lelang pertama, tidak ada pemenang, dan direncanakan lelang kedua, namun waktu pelaksanaan tidak mencukupi, sehingga paket tersebut tidak jadi dilelang.

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.243.600,00	35.196.150,00	21,56	Pembayaran Pajak Kendaraan Alat Berat tidak dilakukan karena Alat Berat telah laku dalam proses lelang.
11	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	0,00	0,00	Anggaran Sisa (Rek Dinas PUPR Lama) Pemeliharaan telah dilakukan sesuai kebutuhan akan pemeliharaan Mebel
12	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	13.671.839,00	6.408.625,00	46,87	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara penuh dan dilaksanakan dengan virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan
13	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	645.430.687,00	479.748.150,00	74,32	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga Perjalanan Dinas Dalam daerah dibatasi dan pertemuan rapat koordinasi dilakukan secara virtual (zoom meeting)
14	Penataan Bangunan dan Lingkungan	29.501.443.600,00	20.672.215.000,00	70,07	Proses lelang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Masa kerja Pekerjaan yang akan dilaksanakan tidak mencukupi untuk bisa dilaksanakan pada tahun 2021.
15	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	609.051.300,00	445.993.532,00	73,22	1. Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan 2. Pengukuran terhadap Tanah dan Bangunan yang terdampak jalan akses jembatan Kapuas 3 tidak dapat terlaksana di karenakan adanya pergesaran titik trase jalan akses jembatan kapuas tiga pada sisi Wajok, dan sampai dengan akhir tahun belum ada penetapan titik trase jalan pendekat sisi wajok.
16	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	203.249.497,00	59.405.608,00	29,22	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan (Pelatihan PKRMS) dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan mata anggaran belanja yang di perlukan untuk pertemuan tidak dapat di realisasikan.
17	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	45.037.791,00	14.924.791,00	33,13	Penerapan PPKM Level 4 sehingga pelaksanaan kegiatan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi tidak dapat dilaksanakan secara penuh, dan digunakan dengan sistem virual (Zoom meeting).

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
18	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan JasaKonstruksi pada APBD Provinsi	86.672.060,00	57.722.060,00	66,59	Dilakukanya Pembatasan Pertemuan (PPKM Level 4) sehingga pertemuan dilakukan secara virtual (zoom meeting), sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman rapat tidak di realisasikan secara penuh.

Reff	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)

5	BELANJA DAERAH	766.540.227.246,00	679.449.261.530,00	(87.090.965.716,00)	88,64	0,00
----------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------	-------------

Belanja pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.766.540.227.246,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.679.449.261.530,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 0,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 679.449.261.530,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

	5.1 BELANJA OPERASI	253.291.506.903,00	232.911.262.758,00	(20.380.244.145,00)	91,95	0,00
	5.2 BELANJA MODAL	513.248.720.343,00	446.537.998.772,00	(66.710.721.571,00)	87,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	253.291.506.903,00	232.911.262.758,00	(20.380.244.145,00)	91,95	0,00
	5.1.01 Belanja Pegawai	7.440.587.322,00	6.850.462.064,00	(590.125.258,00)	92,07	0,00
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	222.525.828.322,00	212.189.067.694,00	(10.336.760.628,00)	95,35	0,00
	5.1.05 Belanja Hibah	23.325.091.259,00	13.871.733.000,00	(9.453.358.259,00)	59,47	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.440.587.322,00	6.850.462.064,00	(590.125.258,00)	92,07	0,00

Belanja Pegawai pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 7.440.587.322,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.850.462.064,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.850.462.064,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

	5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.352.322,00	3.149.230.564,00	(349.121.758,00)	90,02	0,00
	5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.526.130.000,00	3.362.780.000,00	(163.350.000,00)	95,37	0,00
	5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	416.105.000,00	338.451.500,00	(77.653.500,00)	81,34	0,00

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.525.828.322,00	212.189.067.694,00	(10.336.760.628,00)	95,35	0,00
---------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------	-------------

Belanja Barang dan Jasa pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 222.525.828.322,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 212.189.067.694,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 212.189.067.694,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.1.02.01 Belanja Barang	69.369.800.485,00	63.069.856.988,00	(6.299.943.497,00)	90,92	0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa	79.008.290.684,00	75.614.011.965,00	(3.394.278.719,00)	95,70	0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	72.759.920.153,00	72.725.513.138,00	(34.407.015,00)	99,95	0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	1.387.817.000,00	779.685.603,00	(608.131.397,00)	56,18	0,00

5.1.05	Belanja Hibah	23.325.091.259,00	13.871.733.000,00	(9.453.358.259,00)	59,47	0,00
---------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	-------------

Belanja Hibah pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 23.325.091.259,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 13.871.733.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 13.871.733.000,00. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	725.091.259,00	0,00	(725.091.259,00)	0,00	0,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.600.000.000,00	13.871.733.000,00	(8.728.267.000,00)	61,38	0,00

5.2	BELANJA MODAL	513.248.720.343,00	446.537.998.772,00	(66.710.721.571,00)	87,00	0,00
------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------	-------------

5.2.01 Belanja Modal Tanah	480.519.245,00	324.334.992,00	(156.184.253,00)	67,50	0,00
----------------------------	----------------	----------------	------------------	-------	------

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.324.435,00	861.374.200,00	(54.950.235,00)	94,00	0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.925.585.847,00	196.441.235.488,00	(32.484.350.359,00)	85,81	0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	282.176.290.816,00	248.861.576.092,00	(33.314.714.724,00)	88,19	0,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	49.478.000,00	(700.522.000,00)	6,60	0,00
5.2.01 Belanja Modal Tanah	480.519.245,00	324.334.992,00	(156.184.253,00)	67,50	0,00

Belanja Modal Tanah pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 480.519.245,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 324.334.992,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 324.334.992,00. Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah	480.519.245,00	324.334.992,00	(156.184.253,00)	67,50	0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	916.324.435,00	861.374.200,00	(54.950.235,00)	94,00	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 916.324.435,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 861.374.200,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 861.374.200,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar	4.119.110,00	4.110.700,00	(8.410,00)	99,80	0,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	491.545.700,00	482.163.000,00	(9.382.700,00)	98,09	0,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	57.760.000,00	56.742.200,00	(1.017.800,00)	98,24	0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.294.450,00	23.149.800,00	(144.650,00)	99,38	0,00

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.580.850,00	34.800.000,00	(14.780.850,00)	70,19	0,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium	7.462.625,00	7.205.000,00	(257.625,00)	96,55	0,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	279.061.700,00	249.703.500,00	(29.358.200,00)	89,48	0,00
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.925.585.847,00	196.441.235.488,00	(32.484.350.359,00)	85,81	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 228.925.585.847,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 196.441.235.488,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 196.441.235.488,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung	228.925.585.847,00	196.441.235.488,00	(32.484.350.359,00)	85,81	0,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	282.176.290.816,00	248.861.576.092,00	(33.314.714.724,00)	88,19	0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 282.176.290.816,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 248.861.576.092,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 248.861.576.092,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan	268.302.499.816,00	235.246.194.092,00	(33.056.305.724,00)	87,68	0,00
--	--------------------	--------------------	---------------------	-------	------

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	13.873.791.000,00	13.615.382.000,00	(258.409.000,00)	98,14	0,00
---	-------------------	-------------------	------------------	-------	------

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 0,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 0,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	750.000.000,00	49.478.000,00	(700.522.000,00)	6,60	0,00
---------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-------------	-------------

Belanja Modal Aset Lainnya pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 750.000.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 49.478.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 49.478.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2021 (Rp)	Realisasi - LO 2020 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2021 (Rp)
8	BEBAN DAERAH	372.689.383.977,25	0,00	372.689.383.977,25	0,00	679.449.261.530,00
	8.1 BEBAN OPERASI	159.938.035.294,25	0,00	159.938.035.294,25	0,00	232.911.262.758,00
	8.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi	212.751.348.683,00	0,00	212.751.348.683,00	0,00	446.537.998.772,00
8.1	BEBAN OPERASI	159.938.035.294,25	0,00	159.938.035.294,25	0,00	232.911.262.758,00
	8.1.01 Beban Pegawai	6.842.092.064,00	0,00	6.842.092.064,00	0,00	6.850.462.064,00
	8.1.02 Beban Barang dan Jasa	139.224.210.230,25	0,00	139.224.210.230,25	0,00	212.189.067.694,00
	8.1.05 Beban Hibah	13.871.733.000,00	0,00	13.871.733.000,00	0,00	0,00
8.1.01	Beban Pegawai	6.842.092.064,00	0,00	6.842.092.064,00	0,00	6.850.462.064,00
	Beban Pegawai pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.842.092.064,00 dan realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.842.092.064,00 atau 0,00%. Jika Beban Pegawai pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.842.092.064,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 6.850.462.064,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -8.370.000,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :					
	- Beban Pegawai - LRA 2021	6.850.462.064,00				
	Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset	-8.370.000,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2021	0,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2020	0,00				
	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00				
	- Beban Pegawai 2021	6.842.092.064,00				
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	139.224.210.230,25	0,00	139.224.210.230,25	0,00	212.189.067.694,00
	Beban Barang dan Jasa pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.139.224.210.230,25 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 139.224.210.230,25 atau 0,00%. Jika Beban Barang dan Jasa pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.139.224.210.230,25 dibandingkan dengan					

realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 212.189.067.694,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -72.964.857.463,75, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Beban Barang	44.731.259.373,00	0,00	44.731.259.373,00	0,00	63.069.856.988,00
2	Beban Jasa	58.546.841.149,25	0,00	58.546.841.149,25	0,00	75.614.011.965,00
3	Beban Pemeliharaan	35.261.899.005,00	0,00	35.261.899.005,00	0,00	72.725.513.138,00
4	Beban Perjalanan Dinas	684.210.703,00	0,00	684.210.703,00	0,00	779.685.603,00

1 Beban Barang 44.731.259.373,00 0,00 44.731.259.373,00 0,00 63.069.856.988,00

Jika Beban Barang pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.44.731.259.373,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang - LRA sebesar Rp. 63.069.856.988,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -18.338.597.615,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Barang - LRA 2021 63.069.856.988,00

a. Persediaan Tahun Anggaran 2021 -94.264.126.294,00

b. Persediaan Tahun Anggaran 2020 75.533.948.500,00

c. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 3.500.000,00

d. Belanja Persediaan yang menjadi Aset -240.196.861,00

e. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2021 628.277.040,00

f. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2020 0,00

g. Hibah dari Pihak Ketiga/Lainya 0,00

h. Persediaan dari BTT 0,00

i. Extracomptable 0,00

- Beban Barang - LO 2021 44.731.259.373,00

2 Beban Jasa 58.546.841.149,25 0,00 58.546.841.149,25 0,00 75.614.011.965,00

Jika Beban Jasa pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.58.546.841.149,25 dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa - LRA sebesar Rp. 75.614.011.965,00 terjadi

perbedaan sebesar Rp. -17.067.170.815,75, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Jasa - LRA 2021	75.614.011.965,00
a. Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2020	0,00
b. Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2021	-4.471.465,75
c. Utang Barang dan Jasa 2020	0,00
d. Utang Barang dan Jasa 2021	263.981.500,00
e. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
f. Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	-17.326.680.850,00
g. Persediaan BLUD Tahun 2020	0,00
h. Persediaan BLUD Tahun 2021	0,00
i. Beban Jasa BTT	0,00

- Beban Jasa - LO 2021 58.546.841.149,25

3 Beban Pemeliharaan 35.261.899.005,00 0,00 35.261.899.005,00 0,00 72.725.513.138,00

Jika Beban Pemeliharaan pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.35.261.899.005,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 72.725.513.138,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -37.463.614.133,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Pemeliharaan - LRA 2021	72.725.513.138,00
a. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021	0,00
b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020	0,00
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset	49.478.000,00
d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset	-37.513.092.133,00

e. Pemeliharaan BTT 0,00

- **Beban Pemeliharaan - LO 2021** 35.261.899.005,00

4 Beban Perjalanan Dinas 684.210.703,00 0,00 684.210.703,00 0,00 779.685.603,00

Beban Perjalanan Dinas pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.684.210.703,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 779.685.603,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -95.474.900,00, dapat dijelaskan sebagai beriku :

- **Beban Perjalanan Dinas - LRA 2021** 779.685.603,00

a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset -95.474.900,00

b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 0,00

c. Perjalanan Dinas BTT 0,00

- **Beban Perjalanan Dinas - LO 2021** 684.210.703,00

8.1.05 Beban Hibah 13.871.733.000,00 0,00 13.871.733.000,00 0,00

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Beban hibah juga termasuk hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar.

3.1.3 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	ASET	4.207.886.472.101,38	0,00
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
	1.1 Aset Lancar	94.268.597.759,75	0,00
	1.3 Aset Tetap	3.622.897.695.516,63	0,00
	1.4 Aset Lainnya	490.720.178.825,00	0,00
	Jumlah Aset	4.207.886.472.101,38	0,00
1.1	ASET LANCAR	94.268.597.759,75	0,00
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
	1.1.6 Beban Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
	1.1.7 Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	94.268.597.759,75	0,00
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah.		
	1. Pendapatan Yang Belum Disetor		0,00
	2. Uang Titipan		0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan.		

	1. Sisa Kas UP/GU/TU		0,00
	2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor		0,00
	3. Uang Titipan		0,00
	4. Jasa Giro		0,00
	5. Kas Lainnya		0,00
1.1.3	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.		
1	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
	Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.		
2	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
	Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.		
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian.		
1.1.4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
	Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.		
1	Angsuran Rumah Dinas	0,00	0,00
2	Angsuran Kendaraan Dinas	0,00	0,00
	Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1.1.5	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
--------------	---------------------------	-------------	-------------

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi.

1	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
---	--------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

2	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
---	------------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
---	---	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	4.471.465,75	0,00
--------------	-----------------------------	---------------------	-------------

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan Sewa gedung)

1	Asuransi dibayar dimuka	4.471.465,75	0,00
2	Sewa gedung	4.471.465,75	0,00
	Jumlah Beban dibayar dimuka	4.471.465,75	0,00
1.1.7	Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
	<p>Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.</p>		
1	Persediaan Barang Pakai Habis	94.264.126.294,00	0,00
2	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3	Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
	Jumlah Persediaan	94.264.126.294,00	0,00
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	<p>Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.</p>		
1.3	Aset Tetap	3.622.897.695.516,63	0,00
	<p>Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :</p>		
1.3.01	Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	0,00
1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.230.898.204.928,63	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	0,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	353.162.510.515,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.842.696.350.924,00)	0,00
	Jumlah Aset Tetap	3.622.897.695.516,63	0,00
1.3.01	Tanah	1.581.229.739.433,00	0,00
1	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2020	0,00	
2	Mutasi Bertambah	1.581.554.074.431,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		

2.3	Beban		
2.4	Mutasi Antar SKPD		
	Mutasi Masuk dari BKAD (Biaya Pembuatan Sertifikat) BAST No. 030/2637/BKAD-F Tanggal, 31 Desember 2021	10.891.600,00	
2.5	Reklas		
	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	25.627.712.514,00	
2.6	Revaluasi		
	SK Penilaian Tanah No. 1997/BKAD/2021	97.624.337.000,00	
2.7	Koreksi		
	Pencatatan Kembali Aset Tanah	2.676.001,00	
2.8	Mutasi Nomenklatur		
	Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	1.457.964.122.324,00	
3	Mutasi Berkurang	324.334.998,00	
3.1	Hibah		
3.2	Penghapusan		
3.3	Mutasi Antar SKPD		
3.4	Reklas		
	Diakui sebagai Aset Dalam Pengerjaan	324.334.992,00	
3.5	Revaluasi		
3.6	Koreksi		
	Koreksi Atas Hasil Penyesuaian Tanah	6,00	
3.7	Rusak Berat		
3.8	Beban		
3.9	Mutasi Nomenklatur		
5	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021	1.581.229.739.433,00	
1.3.02	Peralatan dan Mesin	48.418.638.089,00	0,00
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	0,00	
2	Mutasi Bertambah	49.213.793.978,00	
2.1	Realisasi Belanja Modal	861.374.200,00	
2.2	Hibah		
2.3	Beban		
	Belanja Pemeliharaan diakui sebagai Aset	16.325.000,00	
	Belanja Barang diakui Sebagai Aset	51.997.313,00	
2.4	Mutasi Antar SKPD		

2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga		
2.9 Mutasi Nomenklatur		
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	48.284.097.465,00	
3 Mutasi Berkurang	795.155.889,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
Reklas Ke ALL (Kondisi Rusak Berat)	791.655.889,00	
3.8 Beban		
Belana Modal tidak diakui sebagai Aset	3.500.000,00	
3.9 Ekstracomptable		
3.1.0 Mutasi Nomenklatur		
5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021	48.418.638.089,00	
1.3.03 Gedung dan Bangunan	196.112.943.505,00	0,00
1 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020	0,00	
2 Mutasi Bertambah	380.412.760.359,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	196.441.235.488,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
Belanja Jasa Diakui sebagai Aset	731.981.000,00	
Belanja Pegawai diakui sebagai Aset	4.070.000,00	
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
Pencatatan Kembali Aset Gedung Lab. Konstruksi	589.194.000,00	

2.8	Pengadaan dari Belanja Tidak Terduga		
2.9	Mutasi Nomenklatur		
	Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	182.646.279.871,00	
3	Mutasi Berkurang	184.299.816.854,00	
3.1	Hibah		
3.2	Penghapusan		
	SK No. 1936/BKAD/2021 (PLBN JAGOI)	17.666.279.700,00	
	SK No. 1937/BKAD/2021 (DIREKSI KEET)	118.358.000,00	
	SK No. 1939/BKAD/2021 (REKLAME)	286.253.000,00	
3.3	Mutasi Antar SKPD		
	Mutasi Keluar ke DINAS PERKEBUNAN Berdasarkan BAST Nomor : 028/880/PUPR-D.3 Tanggal, 9 Agustus 2021	20.306.212.619,00	
3.4	Reklas		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi	1.361.125.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	144.561.588.535,00	
3.5	Revaluasi		
3.6	Koreksi		
3.7	Rusak Berat		
3.8	Beban		
3.9	Mutasi Nomenklatur		
5	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021	196.112.943.505,00	
1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.230.898.204.928,63	0,00
1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020	0,00	
2	Mutasi Bertambah	3.350.022.777.520,63	
2.1	Realisasi Belanja Modal	248.861.576.092,00	
2.2	Hibah		
2.3	Beban		
	Belanja Barang diakui Sebagai Aset	70.570.197,00	
	Belanja Jasa Diakui Sebagai Aset	4.915.892.379,00	
	Belanja Pegawai diakui sebagai Aset	3.249.016,00	
	Belanja Pemeliharaan diakui sebagai Aset	37.496.767.133,00	

2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi	1.361.125.000,00	
Reklas dari Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	5.999.930.000,00	
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Mutasi Nomenklatur		
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	3.051.313.667.703,63	
3 Mutasi Berkurang	119.124.572.592,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
Belanja Modal jalan Jaringan dan Irigasi di Akui Sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.124.572.592,00	
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Beban		
3.9 Mutasi Nomenklatur		
5 Aset Tetap Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021	3.230.898.204.928,63	
1.3.05 Aset Tetap Lainnya	55.772.009.970,00	0,00
1 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020	0,00	
2 Mutasi Bertambah	87.399.652.484,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
Belanja Jasa diakui sebagai Aset	3.051.134.900,00	
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		

2.8 Mutasi Nomenklatur			
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR		84.348.517.584,00	
3 Mutasi Berkurang		31.627.642.514,00	
3.1 Hibah			
3.2 Penghapusan			
3.3 Mutasi Antar SKPD			
3.4 Reklas			
Reklas ke Aset Tetap Tanah		25.627.712.514,00	
Reklas ke Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi		5.999.930.000,00	
3.5 Revaluasi			
3.6 Koreksi			
3.7 Rusak Berat			
3.8 Beban			
3.9 Mutasi Nomenklatur			
5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021		55.772.009.970,00	
1.3.06 Kontruksi Dalam Pengerjaan		353.162.510.515,00	0,00
1 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020		0,00	
2 Mutasi Bertambah		353.162.510.515,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal		0,00	
2.2 Hibah			
2.3 Beban			
Beban menjadi aset		8.841.827.806,00	
2.4 Mutasi Antar SKPD			
2.5 Reklas			
Belanja Modal tanah diakui sebagai KDP		324.334.992,00	
Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai KDP		144.561.588.535,00	
Belanja modal jalan irigasi dan jaringan diakui sebagai KDP		119.124.572.592,00	
2.6 Revaluasi			
2.7 Koreksi			
2.8 Mutasi Nomenklatur			
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR		80.310.186.590,00	
3 Mutasi Berkurang		0,00	

3.1 Hibah	
3.2 Penghapusan	
3.3 Mutasi Antar SKPD	
3.4 Reklas	
3.5 Revaluasi	
3.6 Koreksi	
3.7 Rusak Berat	
3.8 Beban	
3.9 Mutasi Nomenklatur	
5 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021	353.162.510.515,00

1.3.07 Akumulasi Penyusutan (1.842.696.350.924,00) 0,00

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut :

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(43.223.811.862,00)	0,00
- Per 31 Desember 2020	0,00	
- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	(40.889.228.880,00)	
- Penyusutan tahun 2021	(2.334.582.982,00)	
- Per 31 Desember 2021	(43.223.811.862,00)	
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.134.125.463,00)	0,00
- Per 31 Desember 2020	0,00	
- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	(28.208.425.970,00)	
- Penyusutan tahun 2021	(7.925.699.493,00)	
- Per 31 Desember 2021	(36.134.125.463,00)	
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.743.947.913.949,00)	0,00
- Per 31 Desember 2020	0,00	
- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	(1.560.895.539.891,00)	
- Penyusutan tahun 2021	(183.052.374.058,00)	
- Per 31 Desember 2021	(1.743.947.913.949,00)	
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(19.390.499.650,00)	0,00
- Per 31 Desember 2020	0,00	

- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	0,00	
- Penyusutan tahun 2021	(19.390.499.650,00)	
- Per 31 Desember 2021	(19.390.499.650,00)	
1.4 ASET LAINNYA	490.720.178.825,00	0,00
Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :		
1.4.3 Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
1.4.4 Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	<u>490.720.178.825,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.1 Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah		
1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna		
1 Sewa	0,00	0,00
2 Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
3 Bangun Guna Serah	0,00	0,00
4 Bangun Serah Guna	0,00	0,00
1.4.3 Aset Tidak Berwujud	2.066.769.795,00	0,00
1 Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.066.769.795,00	0,00
- Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2020	0,00	
-. Mutasi Bertambah	2.066.769.795,00	
1.1 Realisasi Belanja Modal	49.478.000,00	
1.2 Hibah		
1.3 Beban		

1.4 Mutasi Antar SKPD		
1.5 Reklas		
1.6 Revaluasi		
1.7 Koreksi		
1.71 Mutasi Nomenklatur		
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	2.066.769.795,00	
- Mutasi Berkurang	49.478.000,00	
1.8 Hibah		
1.9 Penghapusan		
1.11 Mutasi Antar SKPD		
1.12 Reklas		
1.13 Revaluasi		
1.14 Koreksi		
1.15 Rusak Berat		
1.16 Beban		
Belanja modal yang dicatat sebagai beban pemeliharaan	49.478.000,00	
1.18 Mutasi Nomenklatur		
- Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2021	2.066.769.795,00	
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.018.577.295,00)	0,00
1.4.4 Aset Lain-lain	490.671.986.325,00	0,00
1 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2020	0,00	
2 Mutasi Bertambah	490.671.986.325,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
Reklas AT PDM Ke ALL Surat Usulan Reklas Nomor : 028/1741/PUPR-D.3 Tanggal 28 Desember 2021	15.587.325,00	
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
2.8 Mutasi Nomenklatur		
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR	490.656.399.000,00	
3 Mutasi Berkurang	0,00	

	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
	3.9 Mutasi Nomenklatur		
	5 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2021	490.671.986.325,00	
2	KEWAJIBAN	892.258.540,00	0,00
	2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	2.1.1 Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	2.1.1.1 PPH21		
	2.1.1.2 PPH22		
	2.1.1.3 PPH23		
	2.1.1.4 PPH4		
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.2.1 PPN		
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
	2.3 Utang Belanja	892.258.540,00	0,00
	2.3.1 Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
	2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan		
	2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS		
	2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		
	2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah		
	2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
	2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
	2.3.1.7 Honorarium PNSD		

2.3.1.8 Honorarium Non PNSD		
2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana BOS		
2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan		
2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD		
2.3.2 Utang Belanja Barang Jasa	892.258.540,00	0,00
2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis		
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pelaksanaan Perkuatan Tebing Gg. Selat Madura Dalam Oleh CV. ALAM BORNEO	139.518.000,00	
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Barang Yang diserahkan Ruas Jl. Tebas - Jawai (Sentebang) Tanah Hitam	488.759.040,00	
2.3.2.2 Belanja Bahan/Material		
2.3.2.3 Belanja Jasa Kantor		
Tagihan Air	2.408.000,00	
2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi		
2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan		
2.3.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan		
2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat		
2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan		
2.3.2.11 Belanja Makanan dan Minuman		
2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja		
2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu		
2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas		
2.3.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
2.3.2.17 Belanja kursus, latihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS		
2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan		
2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi		
Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-JasaPengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor Gubernur (6 Lantai) Tahap III oleh PT. Cipta Indah Citra	261.573.500,00	

2.3.2.20	Belanja Barang Dana BOS		
2.3.2.21	Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah		
2.3.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS		
2.3.2.23	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD		
2.3.2.24	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat		
2.3.2.25	Belanja Barang dan Jada BLUD		
2.3.2.26	Belanja Bantuan Sosial Barang		
2.3.3	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
2.3.3.1	Belanja Tanah		
2.3.3.2	Belanja Peralatan Dan Mesin		
2.3.3.3	Belanja Gedung dan Bangunan		
2.3.3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
2.3.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		
2.3.3.6	Belanja Aset Lainnya		
	Jumlah Kewajiban	892.258.540,00	0,00
3	EKUITAS	4.206.994.213.561,38	0,00
	Pada Neraca per 31 Desember 2021 Ekuitas sebesar 4.206.994.213.561,38 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2020 saldo Ekuitas sebesar 0,00		
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.207.886.472.101,38	0,00

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal	0,00
2 Surplus/ Defisit - LO	(370.727.554.783,25)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional	(370.727.554.783,25)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional	0,00
2.3 Pos Luar Biasa	0,00
3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :	
Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:	
3.1 Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode	
3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	97.624.336.994,00
Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.	
Hasil Penilaian TANAH di Bawah Jalan SK N0. 1997/BKAD/2021 Rp97.624.337.000	
Koreksi Nilai Rp1,- akibat Hasil Penilaian TANAH (6 Ruas Tanah untuk Jalan) -Rp6	
3.3 Lain - lain	3.818.088.594.416,63
Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas	
a. Penyisihan Piutang	0,00
b. Koreksi Penyusutan	0,00
c. Hibah Keluar	0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD	10.891.600,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD	(19.493.964.115,00)
f. Penghapusan TPTGR	0,00
g. Perubahan Kode Rekening	0,00
h. Koreksi Tanah	2.676.001,00
i. Koreksi Utang Belanja	0,00
j. Reklass Antar Akun	(5.999.930.000,00)
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00
n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00
o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan	108.931.560,00
q. Koreksi Persediaan	0,00

r. Koreksi Kas	0,00
s. Extracomptable	0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00
w. Koreksi Piutang	0,00
x. Koreksi Aset Lain Lain	0,00
y. Pelimpahan Masuk	3.843.459.989.370,63
z. Pelimpahan Keluar	0,00
4 Ekuitas Akhir	3.544.985.376.627,38

**ANALISIS
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. ANALISIS VERTIKAL	
1) Analisis vertikal dalam LRA	
Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja	Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN	(679.449.261.530,00)
TOTAL PENDAPATAN	0,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	679.449.261.530,00
Selisih	0,00
2) Analisis vertikal dalam Neraca	
Uraian	Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas	Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS	
ASET	4.209.848.301.295,38
KEWAJIBAN	892.258.540,00
EKUITAS	4.208.956.042.755,38
Selisih	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS	
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00
Selisih	0,00

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)	
Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa(LO)	Surplus/Defisit LO= Total Pendapatan(LO) - Total Beban(LO)+/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional(LO) +/- Pos Luar Biasa(LO)
RUMUS	
SURPLUS(DEFISIT) LO	: (370.727.554.783,25)
TOTAL PENDAPATAN(LO)	: 0,00
TOTAL BEBAN(LO)	: (370.727.554.783,25)
TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL	: 0,00
TOTAL POS LUAR BIASA	: 0,00
Selisih	: 0,00
4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	
Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir	: 3.544.985.376.627,38
Ekuitas Awal	: 0,00
Surplus/defisit LO	: (370.727.554.783,25)
Koreksi	: 3.915.712.931.410,63
Selisih	: 0,00
b. ANALISIS HORIZONTAL	
1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca	
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL TANAH	: 324.334.992,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	: 1.581.229.739.433,00
- ASET TANAH 2021	: 1.581.229.739.433,00

- ASET TANAH 2020	:	0,00
Selisih	:	(1.580.905.404.441,00)
Reklas akibat dari perubahan nomenklatur -Rp1.457.964.122.324		
Belanja Modal Tanah Tidak Diakui Sebagai Aset Rp324.334.992,00		
Reklas dari Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) -Rp25.627.712.514		
Hasil Penilaian TANAH di Bawah Jalan SK N0. 1997/BKAD/2021 -Rp97.624.337.000		
Koreksi Nilai Rp1,- akibat Hasil Penilaian TANAH (6 Ruas Tanah untuk Jalan) Rp6		
Koreksi Pencatatan Kembali Tanah Gedung Kantor -Rp2.676.001		
Mutasi Masuk dari BKAD (Biaya Pembuatan Sertifikat) BAST No. 030/2637/BKAD-F Tanggal, 31 Desember 2021 -Rp10.891.600		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan	
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	:	861.374.200,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	48.418.638.089,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2021	:	48.418.638.089,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2020	:	0,00
Selisih	:	(47.557.263.889,00)
Reklas akibat dari perubahan nomenklatur -Rp48.284.097.465		
Belanja Modal tidak diakui sebagai Aset Rp3.500.000		
Belanja Pemeliharaan diakui sebagai Aset -Rp16.325.000		
Belanja Barang diakui Sebagai Aset -Rp51.997.313		
Reklas Peralatan dan Mesin Kondisi Rusak Berat Rp791.655.889		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan	
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	:	196.441.235.488,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	196.112.943.505,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2021	:	196.112.943.505,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2020	:	0,00
Selisih	:	328.291.983,00
Reklas akibat dari perubahan nomenklatur -Rp182.646.279.871		

Belanja Pegawai diakui sebagai Aset -Rp4.070.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi Rp1.361.125.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp144.561.588.535	
Belanja Jasa Diakui sebagai Aset -Rp731.981.000	
Koreksi Pencatatan Kembali Gedung Kantor-Rp589.194.000	
Penghapusan GDB SK No. 1936/BKAD/2021 (PLBN JAGOI) Rp17.666.279.700	
Penghapusan GDB SK No. 1937/BKAD/2021 (DIREKSI KEET) Rp118.358.000	
Penghapusan GDB SK No. 1939/BKAD/2021 (REKLAME) Rp286.253.000	
BAST No. 028/880/PUPR-D.3 (DISBUN) Rp20.306.212.619	
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	: 248.861.576.092,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	: 3.230.898.204.928,63
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2021	: 3.230.898.204.928,63
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2020	: 0,00
Selisih	: (2.982.036.628.836,63)
Reklas akibat dari perubahan nomenklatur -Rp3.051.313.667.703,63	
Belanja Pegawai diakui sebagai Aset -Rp3.249.016	
Belanja Modal jalan Jaringan dan Irigasi di Akui Sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp119.124.572.592	
Belanja Barang diakui Sebagai Aset -Rp70.570.197	
Belanja Pemeliharaan diakui sebagai Aset -Rp37.496.767.133	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan diakui sebagai Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi -Rp1.361.125.000	
Belanja Jasa Diakui Sebagai Aset -Rp4.915.892.379	
Reklas dari Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) -Rp5.999.930.000	
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS	
REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	: 0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	: 55.772.009.970,00
- ASET TETAP LAINNYA 2021	: 55.772.009.970,00

- ASET TETAP LAINNYA 2020	:	0,00
Selisih	:	(55.772.009.970,00)
Belanja Jasa diakui sebagai Aset -Rp3.051.134.900		
Reklas ke Aset Tetap Tanah Rp25.627.712.514		
Reklas ke Aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp5.999.930.000		
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR (Rp. 84.348.517.584,00)		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan	
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA	:	49.478.000,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	492.738.756.120,00
- ASET LAINNYA 2021	:	492.738.756.120,00
- ASET LAINNYA 2020	:	0,00
Selisih	:	(492.689.278.120,00)
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR (Rp. 492.723.168.795,00)		
Belanja modal yang dicatat sebagai beban pemeliharaan sebesar Rp. 49.478.000.00		
Reklas AT PDM Ke ALL Surat Usulan Reklas Nomor : 028/1741/PUPR-D.3 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar (Rp. 15,587,325.00)		
2) Analisis horizontal antara LO,Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca		
Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	
RUMUS		
EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	0,00
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	:	0,00
Selisih	:	0,00
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas		
RUMUS		
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	:	(370.727.554.783,25)
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	(370.727.554.783,25)
Selisih	:	0,00

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca	Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS	
EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: 3.544.985.376.627,38
EKUITAS (NERACA)	: 3.544.985.376.627,38
Selisih	: 0,00
3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca	
Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun	Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PAJAK (LO)	: 0,00
PENDAPATAN PAJAK (LRA)	: 0,00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0,00
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	: 0,00
Selisih	: 0,00
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun	Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	: 0,00
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	: 0,00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	: 0,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	: 0,00
Selisih	: 0,00
Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan(LO)=Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)+Persediaan Awal Tahun-Persediaan Akhir Tahun.Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i>
RUMUS	
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	: 44.731.259.373,00
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	: 63.069.856.988,00
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	: 0,00

PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:	(94.264.126.294,00)
Selisih	:	75.925.528.679,00
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR Rp. 75.533.948.500,00		
Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap sebesar Rp. 3.500.000,00		
Belanja Persediaan yang menjadi Aset sebesar (Rp. 240.196.861.00)		
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 139.518.000.00		
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp. 488.759.040.00		
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun		Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun
RUMUS		
BEBAN PENYUSUTAN (LO)	:	210.789.519.489,00
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN	:	1.840.734.521.730,00
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN	:	0,00
AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN	:	2.018.577.295,00
AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN	:	0,00
Selisih	:	(1.631.963.579.536,00)
Mutasi Perubahan Nomenklatur DPUPR (Rp. 1.629.663.999.462,00)		
Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar ke DINAS PERKEBUNAN Berdasarkan BAST Nomor : 028/880/PUPR-D.3 Tanggal, 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 812,248,504.00		
Akumulasi Penyusutan Reklas AT PDM Ke ALL Surat Usulan Reklas Nomor : 028/1741/PUPR-D.3 Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp. 776,068,564.00		
Akumulasi Penyusutan Reklas ATL Ke JJI Surat Nomor : 028/1749/PUPR-D.3 Tanggal, 30 Desember 2021 sebesar (Rp. 5.999.930.000,00)		
Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset Gedung PLBN Jagoi Babang Nomor : 1936/BKAD/2021 Tanggal, 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.473.279.158.00		
Akumulasi Penyusutan Penghapusan Gedung Direksi Keet BAST Nomor : 1937/BKAD/2021 Tanggal, 31 Desember 2021 sebesar Rp. 33,140,240.00		
Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset Panggung Reklame BAST Nomor : 1939/BKAD/2021 Tanggal, 31 Desember 2021 sebesar Rp. 85,875,900.00		
Akumulasi Penyusutan Pencatatan Kembali Aset Eks Kanwil Gedung dan Bangunan sebesar (Rp 480.262.440,00)		

**PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2021
YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2021**

SKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	URAIAN	REALISASI 2021		SELISIH	KETERANGAN	
		BELANJA MODAL	NERACA		Nilai	Penjelasan
1	Tanah	324.334.992,00	0,00	(324.334.992,00)	(324.334.992,00)	Belanja Modal tanah diakui sebagai KDP
2	Peralatan dan Mesin	861.374.200,00	926.196.513,00	64.822.313,00	51.997.313,00 (3.500.000,00) 16.325.000,00	Belanja barang diakui sebagai aset Belanja modal peralatan dan mesin diakui sebagai barang Belanja pemeliharaan diakui sebagai aset
3	Gedung dan Bangunan	196.441.235.488,00	51.254.572.953,00	(145.186.662.535,00)	4.070.000,00 (1.361.125.000,00) (144.561.588.535,00) 731.981.000,00	Belanja pegawai diakui sebagai aset Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap jalan irigasi dan jaringan Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan Belanja jasa diakui sebagai aset
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	248.861.576.092,00	173.584.607.225,00	(75.276.968.867,00)	3.249.016,00 (119.124.572.592,00) 70.570.197,00 37.496.767.133,00 1.361.125.000,00 4.915.892.379,00	Belanja pegawai diakui sebagai aset Belanja modal jalan irigasi dan jaringan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan Belanja barang diakui sebagai aset Belanja pemeliharaan diakui sebagai aset Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebagai aset tetap jalan irigasi dan jaringan Belanja jasa diakui sebagai aset
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	3.051.134.900,00	3.051.134.900,00	3.051.134.900,00	Belanja jasa diakui sebagai aset
6	Aset Lainnya	49.478.000,00	0,00	(49.478.000,00)	(49.478.000,00)	Belanja modal yang dicatat sebagai beban pemeliharaan
Jumlah		446.537.998.772,00	228.816.511.591,00	(217.721.487.181,00)	-217.721.487.181,00	

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat merupakan Dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 Tanggal 6 Mei 2021

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu Dinas teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat , mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Perumusan kebijakan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintaha dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
8. Pelaksanaan Administrasi dilingkungan Dinas, dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan

4.3 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat merupakan dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIAT

Dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

BIDANG BINA MARGA

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan , pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayan dan administrasi di bidang bina marga,.

BIDANG CIPTA KARYA

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya

BIDANG PENATAAN RUANG DAN BINA JASA KONSTRUKSI

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang dan bina jasa konstruksi.

4.4 Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan yang menggambarkan kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat merumuskan visinya yang akan dicapai oleh Dinas Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Melalui Visi Dinas diatas, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan mutu dan produktivitasnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas di bidang

sumberdaya air, bina marga, cipta karya, penatan ruang dan bina jasa konstruksi serta melakukan terus menerus pembinaan dan pengendalian, baik terhadap sumber daya manusia aparatur dinas maupun terhadap penyedia Jasa Konstruksi dan Masyarakat, yakni dengan cara melakukan upaya-upaya guna mengefektifkan dan mengembangkan sistem dan tata laksana pelayanan yang terkendali serta diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, maka penjelasan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

4.5	Extracomtable	Tahun 2021	Tahun 2020
	a. Persediaan Lain-lain		
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
	b. Aset Tetap		
	Aset yang bernilai dibawah Rp500.00,00 (ASET EXTRACOMTABLE)	380.442.952,00	380.442.952,00

Pontianak, 31 Desember 2021
PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prov Kalbar

SUKRI, ST., MT
NIP: 19690301 199203 1 009

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021.

Pontianak, 31 Desember 2021
PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prov Kalbar

SUKRI, ST., MT